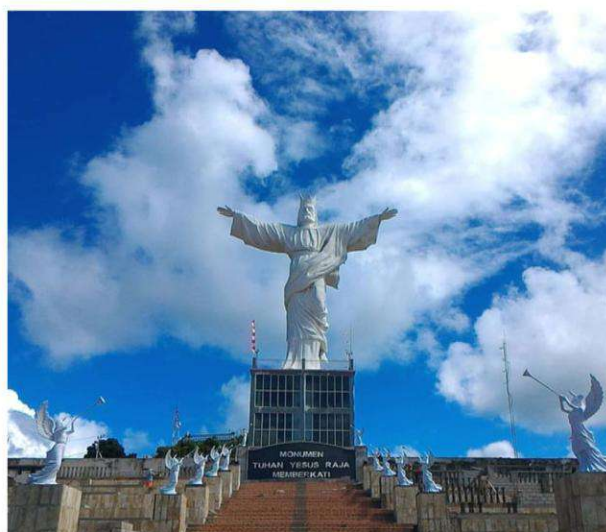




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2026 (RENJA – SKPD)



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 dapat tersusun. Adapun penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada setiap tingkat sasaran. Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukkan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para *stakeholder* sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja yang akan datang. Kami berharap Rencana Kerja yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam merumuskan kegiatan, menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melonguane, September 2025

SEKRETARIS DPRD,



ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770915 200212 1 003

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penyusunan.....	6
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD....	36
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	50
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	55
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	67
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD.....	68
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	71
3.3. Program dan Kegiatan.....	72
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD.....	87
 BAB V	
PENUTUP.....	91
5.1. Catatan Penting	91
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	91
5.3. Rencana Tindak Lanjut	92
 LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	8
2.	Tabel 2.1.1. Faktor-Faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja	16
2.	Tabel 2.1.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	20
3.	Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	37
4.	Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	55
5.	Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program, Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	77
6.	Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Ranwal Renja Tahun 2026.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

5.	Lampiran	V. Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026	107
6.	Lampiran	VI. Bukti Dokumentasi Pelaksanaan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026	109

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Penyusunan Renja sebagai dokumen Perangkat Daerah, mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani Perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dari bidang-bidang Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal merupakan proses dari penyusunan Renja untuk memberikan panduan dan arahan kepada bidang-bidang Perangkat Daerah dengan mendasari hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah. Setelah Renja Perangkat Daerah dibuat tahap selanjutnya merumuskan dokumen menjadi bahan penyusunan dokumen RKPD

melalui Forum Perangkat Daerah guna merumuskan rancangan akhir dan penetapan RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Bagian Perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Renja Kerja Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan merupakan indikator pencapaian sasaran organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2026. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan SKPD yang melaksanakan penunjang urusan, yaitu sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 ini disusun dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2026 tentunya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan terakhir diperbaharui oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Kepulauan Talaud;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2026, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun maksud Penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini juga adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen Renja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2026 sesuai dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;
2. Mengelola program kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat/tolak ukur keberhasilan/kegagalan, dan melakukan evaluasi secara objektif sesuai indikator yang telah ditetapkan pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2026.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi;
6. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur dalam pencapaian tujuan organisasi;
7. Sebagai acuan dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelaksanaan program yang terukur;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk periode 1 (satu) tahun secara aktif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sitematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2026, yaitu :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sitematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. Adapun evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024

Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2025 serta Rencana Kerja Tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 9 kegiatan dengan 21 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 7 kegiatan dengan 31 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

No	Kod e	Uruan/Bidang Pemerintahan Daeah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Renstra pada tahun 2025 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD (Tahun 2020-2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kineja dan Realisasi Anggran Renja SKPD s/d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kineja dan Realisasi Anggran Renstra s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9 = 8/7 x 100%)		10 = 6 + 8		(11 = 10/5 x 100%)		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
I	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																SEKRETARIAT DPRD	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
1	4.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Agenda DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00 %	Rp 623.867.000.000	80,00%	Rp 233.177.075.026	100,00 %	Rp 143.792.140.026	98,15 %	Rp 121.366.813.451	98,15%	84,40%	178,15%	Rp 354.543.888.477	178,15 %	56,83 %	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
			% Agenda Pembahasan Dewan Yang Terlaksana Tepat Waktu	100%	Rp 623.867.000.000	80,00%	Rp 233.177.075.026	100%	Rp 143.792.140.026	98,15 %	Rp 121.366.813.451	98,15%	84,40%	178,15%	Rp 354.543.888.477	178,15 %	56,83 %		
			% Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu	85%	Rp 518.000.000	75,15%	Rp 62.347.110	80%	Rp 31.525.000	98,15 %	Rp 11.500.000	122,69%	36,48%	173,30%	Rp 73.847.110	203,88 %	14,26 %		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175 Doku men	Rp 318.000.000	88 Dokume n	Rp 37.927.090	44 Doku men	Rp 24.315.000	44 Doku men	Rp 7.920.000	100,00%	32,57%	132 Dokume n	Rp 45.847.090	75,43 %	14,42 %		

	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen	Rp 200.000.000	37 Dokumen	Rp 24.420.020	19 Dokumen	Rp 7.210.000	19 Dokumen	Rp 3.580.000	100%	49,65%	56 Dokumen	Rp 28.000.020	62,22 %	14,00 %		
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	Rp 30.000.000	15 Dokumen	Rp -	13 Dokumen	Rp 6.580.000	13 Dokumen	Rp 1.220.000	100%	18,54%	28 Dokumen	Rp 1.220.000	112,00 %	4,07%		
	4.02.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	Rp 88.000.000	36 Laporan	Rp 13.507.070	12 Laporan	Rp 10.525.000	12 Laporan	Rp 3.120.000	100%	29,64%	48 Laporan	Rp 16.627.070	80,00 %	18,89 %		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4190 Dokumen	Rp 13.682.000.000	1428 Dokumen	Rp 18.352.694.315	654 Dokumen	Rp 2.728.923.434	420 Dokumen	Rp 2.670.548.434	64,22%	97,86%	1848 Dokumen	Rp 21.023.242.749	44,11 %	153,66 %		
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang	Rp 13.600.000.000	360 Orang	Rp 18.328.944.115	36 Orang	Rp 2.713.649.434	39 Orang	Rp 2.667.718.434	108%	98,31%	399 Orang	Rp 20.996.662.549	19,00 %	154,39 %		
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2000 Dokumen	Rp 44.000.000	1014 Dokumen	Rp 10.500.000	600 Dokumen	Rp 12.024.000	363 Dokumen	Rp 2.830.000	61%	23,54%	1377 Dokumen	Rp 13.330.000	68,85 %	30,30 %		

4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90 Laporan	Rp 38.000.000	54 Laporan	Rp 13.250.200	18 Laporan	Rp 3.250.000	18 Laporan	Rp -	100%	0,00%	72 Laporan	Rp 13.250.200	80,00 %	34,87 %		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	875 Dokumen	Rp 70.600.000.000	75 Dokumen	Rp 13.330.518.452	27 Dokumen	Rp 13.381.070.830	26 Dokumen	Rp 12.996.749.458	96,30%	97,13%	101 Dokumen	Rp 26.327.267.910	11,54 %	37,29 %		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	125 Orang	Rp 67.000.000.000	25 Orang	Rp 13.026.728.452	25 Orang	Rp 12.770.570.830	25 Orang	Rp 12.649.874.458	100%	99,05%	50 Orang	Rp 25.676.602.910	40,00 %	38,32 %		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	625 Paket	Rp 2.500.000.000	25 Paket	Rp 177.490.000	2 Paket	Rp 610.500.000	1 Paket	Rp 346.875.000	50%	56,82%	26 Paket	Rp 524.365.000	4,16%	20,97 %		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	125 Orang	Rp 1.100.000.000	25 Orang	Rp 126.300.000	Orang	Rp -	Orang	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	25 Orang	Rp 126.300.000	20,00 %	11,48 %		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	215 Dokumen	Rp 1.225.000.000	67 Dokumen	Rp -	43 Dokumen	Rp 726.422.000	43 Dokumen	Rp 650.734.839	100,00%	89,58%	110 Dokumen	Rp 650.734.839	51,16 %	53,12 %		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	125 Dokumen	Rp 25.000.000	25 Dokumen	Rp -	25 Dokumen	Rp -	25 Dokumen	Rp -	100%	#DIV/0!	50 Dokumen	Rp -	40,00 %	0,00%		

4.02.01.2.15.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	Rp 100.000.000	6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp -	100%	#DIV/0!	12 Laporan	Rp -	40,00 %	0,00%		
4.02.01.2.15.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60 Laporan	Rp 1.100.000.000	36 Laporan	Rp -	12 Laporan	Rp 726.422.000	12 Laporan	Rp 650.734.839	100%	89,58%	48 Laporan	Rp 650.734.839	80,00 %	59,16 %		
4.02.01.2.15.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60 Paket	Rp 500.000.000	12 Paket	Rp -	12 Paket	Rp 40.400.000	12 Paket	Rp 2.240.000	100%	5,54%	24 Paket	Rp 2.240.000	40,00 %	0,45%		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	460 Dokumen	Rp 18.250.000.000	266 Dokumen	Rp 10.506.521.511	129	Rp 5.707.245.000	109 Dokumen	Rp 4.329.049.562	84,50%	75,85%	375 Dokumen	Rp 14.835.571.073	81,52 %	81,29 %		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	180 Dokumen	Rp 10.000.000.000	108 Dokumen	Rp 8.044.543.813	50 Dokumen	Rp 3.710.553.000	47 Dokumen	Rp 3.273.369.462	94%	88,22%	155 Dokumen	Rp 11.317.913.275	86,11 %	113,18 %		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	55 Laporan	Rp 50.000.000	33 Laporan	Rp 12.076.000	11 Laporan	Rp -	Laporan	Rp -	0%	#DIV/0!	33 Laporan	Rp 12.076.000	60,00 %	24,15 %		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20 Dokumen	Rp 100.000.000	12 Dokumen	Rp 8.825.000	12 Dokumen	Rp 13.570.000	9 Dokumen	Rp 11.205.000	75%	82,57%	21 Dokumen	Rp 20.030.000	105,00 %	20,03 %		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	180 Dokumen	Rp 8.000.000.000	108 Dokumen	Rp 2.437.096.698	50 Dokumen	Rp 1.974.722.000	47 Dokumen	Rp 1.044.475.100	94%	52,89%	155 Dokumen	Rp 3.481.571.798	86,11 %	43,52 %		
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	25 Dokumen	Rp 100.000.000	5 Dokumen	Rp 3.980.000	6 Dokumen	Rp 8.400.000	6 Dokumen	Rp -	100%	0,00%	11 Dokumen	Rp 3.980.000	44,00 %	3,98%		

			% Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik	85%	Rp 435.000. 000	50%	Rp 63.495.0 00	80%	Rp 140.476.00 0	60,00 %	Rp -	75,00%	0,00%	110%	Rp 63.495.000	129,41 %	14,60 %		
	4.02. 01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140 Doku men	Rp 235.000. 000	33 Dokume n	Rp 35.235.0 00	30 Doku men	Rp 72.208.000	30 Doku men	Rp -	100,00%	0,00%	63 Dokume n	Rp 35.235.000	45,00 %	14,99 %		
	4.02. 01.1. 03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokum en	Rp 200.000. 000	9 Dokumen	Rp 28.260.0 00	6 Dokum en	Rp 68.268.000	6 Dokum en	Rp -	100%	0,00%	15 Dokume n	Rp 28.260.000	75,00 %	14,13 %		
	4.02. 01.1. 03.0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	120 Lapora n	Rp 35.000.0 00	24 Laporan	Rp 6.975.00 0	24 Lapora n	Rp 3.940.000	24 Lapora n	Rp -	100%	0,00%	48 Laporan	Rp 6.975.000	40,00 %	19,93 %		
	4.02. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1735 Doku men	Rp 4.432.00 0.000	491 Dokume n	Rp 1.693.04 1.137	128 Doku men	Rp 750.501.26 2	127 Doku men	Rp 391.716.59 2	99,22%	52,19%	618 Dokume n	Rp 2.084.757.729	35,62 %	47,04 %		
	4.02. 01.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Rp 32.000.0 00	15 Paket	Rp 5.680.05 2	5 Paket	Rp 5.280.612	4 Paket	Rp 612.330	80%	11,60%	5 Paket	Rp 6.292.382	9,60%	19,66 %		
	4.02. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	100 Paket	Rp 1.000.00 0.000	39 Paket	Rp 249.515. 246	3 Paket	Rp 100.638.30 0	3 Paket	Rp -	100%	0,00%	4 Paket	Rp 249.515.246	4,00%	24,95 %		
	4.02. 01.2. 06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Rp 70.000.0 00	2 Paket	Rp 88.997.5 49	Paket	Rp -	Paket	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp 88.997.549	#DIV/0!	127,14 %		

	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	Rp 300.000.000	100 Paket	Rp 186.775.000	3 Paket	Rp 7.711.000	3 Paket	Rp -	100%	0,00%	4 Paket	Rp 186.775.000	0,80%	62,26%		
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket	Rp 450.000.000	75 Paket	Rp 140.150.760	50 Paket	Rp 102.990.600	50 Paket	Rp -	100%	0,00%	51 Paket	Rp 140.150.760	68,00%	31,14%		
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	Rp 380.000.000	40 Paket	Rp 94.556.600	2 Paket	Rp 30.458.750	2 Paket	Rp 7.387.000	100%	24,25%	3 Paket	Rp 101.943.600	3,00%	26,83%		
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	Rp 500.000.000	120 Laporan	Rp 110.950.000	15 Laporan	Rp 218.400.000	15 Laporan	Rp 127.175.000	100%	58,23%	16 Laporan	Rp 238.125.000	3,20%	47,63%		
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	Rp 1.700.000.000	100 Laporan	Rp 816.415.930	50 Laporan	Rp 285.022.000	50 Laporan	Rp 256.542.262	100%	90,01%	51 Laporan	Rp 1.072.958.192	12,75%	63,12%		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	210 Dokumen	Rp 3.000.000.000	21 Dokumen	Rp 450.341.027	10 Dokumen	Rp 58.044.000	7 Dokumen	Rp 58.044.000	70,00%	100,00%	28 Dokumen	Rp 508.385.027	13,33%	16,95%		
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	100 Paket	Rp 1.000.000.000	15 Paket	Rp 253.469.000	Paket	Rp -	Paket	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	15 Paket	Rp 253.469.000	15,00%	25,35%		
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 1.000.000.000	1 Unit	Rp 187.999.000	10 Unit	Rp 58.044.000	7 Unit	Rp 58.044.000	70%	100,00%	8 Paket	Rp 246.043.000	80,00%	24,60%		
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 Unit	Rp 1.000.000.000	5 Unit	Rp 8.873.027	Unit	Rp -	Unit	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	5 Paket	Rp 8.873.027	5,00%	0,89%		

	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2640 Dokumen	Rp 2.190.000.000	334 Dokumen	Rp 1.226.917.130	30 Dokumen	Rp 786.642.000	30 Dokumen	Rp 380.859.195	100,00%	48,42%	364 Dokumen	Rp 1.607.776.325	13,79%	73,41%		
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	Rp 40.000.000	250 Laporan	Rp -	Laporan	Rp -	Laporan	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	250 Laporan	Rp -	10,00%	0,00%		
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	Rp 600.000.000	36 Laporan	Rp 125.777.130	12 Laporan	Rp 76.932.000	12 Laporan	Rp 37.849.195	100%	49,20%	48 Laporan	Rp 163.626.325	80,00%	27,27%		
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp 21.580.000	6 Laporan	Rp 6.660.000	100%	30,86%	18 Laporan	Rp 6.660.000	90,00%	13,32%		
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	Rp 1.500.000.000	36 Laporan	Rp 1.101.140.000	12 Laporan	Rp 688.130.000	12 Laporan	Rp 336.350.000	100%	48,88%	48 Laporan	Rp 1.437.490.000	80,00%	95,83%		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	440 Dokumen	Rp 355.410.000.000	109 Dokumen	Rp 132.044.280.250	204 Dokumen	Rp 84.052.733.500	195 Dokumen	Rp 69.945.863.848	95,99%	83,22%	304 Dokumen	Rp 201.990.144.098	69,20%	56,83%		
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 32.039.000	Unit	Rp -	Unit	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Unit	Rp 32.039.000	10,00%	32,04%		

	4.02.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp -	12 Unit	Rp 18.737.500	12 Unit	Rp 5.180.000	100%	27,65%	13 Unit	Rp 5.180.000	26,00 %	5,18%		
	4.02.01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 2.000.000.000	1 Unit	Rp -	Unit	Rp -	Unit	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Unit	Rp -	50,00 %	0,00%		
	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit	Rp 100.000.000	Unit	Rp -	15 Unit	Rp 20.160.000	13 Unit	Rp -	87%	0,00%	13 Unit	Rp -	26,00 %	0,00%		
			% SDM Aparatur Setwan Yang Bersertifikat Keahlian	80%	Rp 179.110.000.000	0%	Rp 66.006.120.625	80%	Rp 42.076.134.000	33,33 %	Rp 35.025.571.924	6,67%	83,24%	33,33%	Rp 101.031.692.549	41,66 %	56,41 %		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327 Dokumen	Rp 174.000.000.000	106 Dokumen	Rp 66.006.120.625	176 Dokumen	Rp 41.937.702.000	170 Dokumen	Rp 34.915.111.924	96,76%	83,25%	171 Dokumen	Rp 34.915.111.925	52,31 %	20,07 %		
	4.02.01.2.05.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150 Paket	Rp 4.610.000.000	Paket	Rp -	76 Paket	Rp 131.932.000	74 Paket	Rp 109.600.000	97%	83,07%	74 Paket	Rp 109.600.000	49,33 %	2,38%		
	4.02.01.2.05.10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	Rp 500.000.000	36 Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp 6.500.000	12 Dokumen	Rp 860.000	100%	13,23%	48 Paket	Rp 860.000	80,00 %	0,17%		
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	30 Orang	Rp 340.000.000	2 Orang	Rp 51.099.400	6 Orang	Rp 111.304.000	4 Orang	Rp 66.890.000	67%	60,10%	6 Paket	Rp 117.989.400	20,00 %	34,70 %		

		SEKRETARIAT DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	85	Rp 62.800.000.000	66,67	Rp 26.420.897.014	80	Rp 16.373.708.000	79,13	Rp 13.502.375.762	98,91%	82,46%	145,8	Rp 39.923.272.776	171,53 %	63,57 %		
2	4.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																	
			% Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD	100%	Rp 62.800.000.000	66,67%	Rp 26.420.897.014	80%	Rp 16.373.708.000	66,67 %	Rp 13.502.375.762	83,34%	82,46%	133,34%	Rp 39.923.272.776	133,34 %	63,57 %	BAGIAN PERSIDANGAN	
			% Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah	100%	Rp 42.950.000.000	57,14%	Rp 13.113.227.197	100%	Rp 8.940.550.000	30,00 %	Rp 7.733.010.400	30,00%	86,49%	87,14%	Rp 20.846.237.597	87,14 %	48,54 %		
	4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1042 Dokumen	Rp 53.000.000.000	360 Dokumen	Rp 16.337.466.672	210 Dokumen	Rp 9.856.146.000	173 Dokumen	Rp 8.617.684.400	82,38%	87,43%	533 Dokumen	Rp 24.955.151.072	51,15 %	47,09 %		
	4.02.02.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	180 Laporan	Rp 2.500.000.000	36 Laporan	Rp 1.116.649.600	Laporan	Rp -	Laporan	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	36 Laporan	Rp 1.116.649.600	20,00 %	44,67 %		
	4.02.02.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	125 Dokumen	Rp 50.000.000	25 Dokumen	Rp 13.255.000	25 Dokumen	Rp -	25 Dokumen	Rp -	100%	#DIV/0!	50 Laporan	Rp 13.255.000	40,00 %	26,51 %		
	4.02.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375 Dokumen	Rp 11.000.000.000	225 Dokumen	Rp 2.133.383.500	75 Dokumen	Rp 1.532.110.000	50 Dokumen	Rp 1.447.849.000	67%	94,50%	275 Laporan	Rp 3.581.232.500	73,33 %	32,56 %		

	4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	318 Dokumen	Rp 35.450.000.000	62 Dokumen	Rp 12.156.811.817	98 Dokumen	Rp 8.315.551.000	91 Dokumen	Rp 7.169.835.400	92,86%	86,22%	153 Dokumen	Rp 19.326.647.217	48,11 %	54,52 %		
	4.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	22 Dokumen	Rp 500.000.000	6 Dokumen	Rp 166.957.815	6 Dokumen	Rp 8.485.000	1 Dokumen	Rp -	17%	0,00%	7 Dokumen	Rp 166.957.815	31,82 %	33,39 %		
	4.02.02.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	22 Dokumen	Rp 3.500.000.000	6 Dokumen	Rp 750.408.940	6 Dokumen	Rp -	6 Dokumen	Rp -	100%	#DIV/0!	12 Dokumen	Rp 750.408.940	54,55 %	21,44 %		
	4.02.02.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	22 Dokumen	Rp 3.500.000.000	6 Dokumen	Rp 39.048.625	6 Dokumen	Rp 616.514.000	6 Dokumen	Rp 563.175.000	100%	91,35%	12 Dokumen	Rp 602.223.625	54,55 %	17,21 %		
	4.02.02.01.04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	22 Dokumen	Rp 800.000.000	6 Dokumen	Rp 356.161.200	6 Dokumen	Rp 162.646.000	6 Dokumen	Rp 115.199.000	100%	70,83%	12 Dokumen	Rp 471.360.200	54,55 %	58,92 %		
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	Rp 800.000.000	1 Dokumen	Rp 412.155.821	2 Dokumen	Rp 113.606.000	2 Dokumen	Rp 106.391.000	100,00%	93,65%	3 Dokumen	Rp 518.546.821	150,00 %	64,82 %		
	4.02.02.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	Rp 800.000.000	1 Dokumen	Rp 412.155.821	2 Dokumen	Rp 113.606.000	2 Dokumen	Rp 106.391.000	100%	93,65%	3 Dokumen	Rp 518.546.821	150,00 %	64,82 %		
			% Anggota DPRD Yang Bersertifikat Pelatihan	100%	Rp 16.500.000.000	100%	Rp 6.674.515.730	100%	Rp 4.474.612.000	100,00 %	Rp 3.794.199.600	100,00%	84,79%	200%	Rp 10.468.715.330	200%	63,45 %		

			Peningkatan																
	4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	200 Dokumen	Rp 8.300.000.000	35 Dokumen	Rp 3.345.407.865	44 Dokumen	Rp 2.237.306.000	42 Dokumen	Rp 1.897.099.800	95,45%	84,79%	77 Dokumen	Rp 5.242.507.665	38,50%	63,16%		
	4.02.02.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	25 Dokumen	Rp 750.000.000	Dokumen	Rp -	25 Dokumen	Rp 588.776.000	25 Dokumen	Rp 587.380.000	100%	99,76%	25 Dokumen	Rp 587.380.000	100,00%	78,32%		
	4.02.02.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	20 Dokumen	Rp 3.200.000.000	4 Dokumen	Rp 1.470.324.565	2 Dokumen	Rp 528.880.000	2 Dokumen	Rp 511.739.700	100%	96,76%	6 Dokumen	Rp 1.982.064.265	30,00%	61,94%		
	4.02.02.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	30 Dokumen	Rp 2.100.000.000	6 Dokumen	Rp 1.217.838.300	4 Dokumen	Rp 698.700.000	4 Dokumen	Rp 583.824.100	100%	83,56%	10 Dokumen	Rp 1.801.662.400	33,33%	85,79%		
	4.02.02.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	Rp 400.000.000	5 Orang	Rp 109.800.000	Orang	Rp -	Orang	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	5 Orang	Rp 109.800.000	20,00%	27,45%		
	4.02.02.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30 Orang	Rp 750.000.000	6 Orang	Rp 432.000.000	6 Orang	Rp 162.000.000	6 Orang	Rp 108.000.000	100%	66,67%	12 Orang	Rp 540.000.000	40,00%	72,00%		
	4.02.02.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	Rp 1.000.000.000	12 Dokumen	Rp 99.145.000	5 Dokumen	Rp 258.950.000	5 Dokumen	Rp 106.156.000	100%	40,99%	17 Orang	Rp 205.301.000	28,33%	20,53%		
	4.02.02.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	10 Dokumen	Rp 100.000.000	2 Dokumen	Rp 16.300.000	2 Dokumen	Rp -	Dokumen	Rp -	0%	#DIV/0!	2 Orang	Rp 16.300.000	20,00%	16,30%		
3	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% PERDA Yang diterbitkan Tepat Waktu	85%	Rp 56.800.000.000	78,88%	Rp 19.121.302.487	80%	Rp 11.627.256.000	66,67%	Rp 9.882.101.400	83,34%	84,99%	145,6%	Rp 29.003.403.887	171,24%	51,06%	BAGIAN PENGAWASAN & PENGANGGARAN	

			% Temuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yangDitindaklanj uti oleh DPRD tepat waktu	100%	Rp 3.100.00 0.000	100%	Rp 1.745.74 8.600	100%	Rp 369.736.00 0	100%	Rp 282.527.00 0	100,00%	76,41%	200,0%	Rp 2.028.275.600	200,00 %	65,43 %		
	4.02. 02.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahahasan Kebijakan Anggaran	100 Doku men	Rp 2.200.00 0.000	20 Dokume n	Rp 886.637. 815	7 Doku men	Rp 662.542.00 0	7 Doku men	Rp 417.413.00 0	100,00%	63,00%	27 Dokume n	Rp 1.304.050.815	27,00 %	59,28 %		
	4.02. 02.0 2.01	Pembahasan KUA dan PPS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPS	15 Dokum en	Rp 300.000. 000	3 Dokumen	Rp 68.986.0 00	1 Dokum en	Rp 41.775.000	1 Dokum en	Rp 41.775.000	100%	100,00%	4 Dokume n	Rp 110.761.000	26,67 %	36,92 %		
	4.02. 02.0 2.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15 Dokum en	Rp 300.000. 000	3 Dokumen	Rp 81.578.0 00	1 Dokum en	Rp 41.775.000	1 Dokum en	Rp 13.595.000	100%	32,54%	4 Dokume n	Rp 95.173.000	26,67 %	31,72 %		
	4.02. 02.0 2.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	15 Dokum en	Rp 500.000. 000	3 Dokumen	Rp 340.450. 720	1 Dokum en	Rp 226.266.00 0	1 Dokum en	Rp 39.400.000	100%	17,41%	4 Dokume n	Rp 379.850.720	26,67 %	75,97 %		
	4.02. 02.0 2.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	15 Dokum en	Rp 500.000. 000	3 Dokumen	Rp 208.968. 300	1 Dokum en	Rp 248.656.00 0	1 Dokum en	Rp 241.573.00 0	100%	97,15%	4 Dokume n	Rp 450.541.300	26,67 %	90,11 %		
	4.02. 02.0 2.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	30 Dokum en	Rp 500.000. 000	6 Dokumen	Rp 88.005.0 00	2 Dokum en	Rp 56.750.000	2 Dokum en	Rp 55.890.000	100%	98,48%	8 Dokume n	Rp 143.895.000	26,67 %	28,78 %		
	4.02. 02.0 2.06	Pembahasan Petanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	10 Dokum en	Rp 100.000. 000	2 Dokumen	Rp 98.649.7 95	1 Dokum en	Rp 47.320.000	1 Dokum en	Rp 25.180.000	100%	53,21%	3 Dokume n	Rp 123.829.795	30,00 %	123,83 %		

	4.02.02.03	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	345 Dokumen	Rp 1.600.00 0.000	68 Dokume n	Rp 1.897.19 8.000	55 Doku men	Rp 1.108.568. 000	55 Doku men	Rp 847.004.00 0	100,00%	76,41%	123 Dokume n	Rp 2.744.202.000	35,65 %	171,51 %		
	4.02.02.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Lapora n	Rp 300.000. 000	12 Laporan	Rp 560.113. 000	12 Lapora n	Rp 327.961.00 0	12 Lapora n	Rp 240.752.00 0	100%	73,41%	24 Laporan	Rp 800.865.000	40,00 %	266,96 %		
	4.02.02.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Lapora n	Rp 150.000. 000	12 Laporan	Rp 245.295. 000	12 Lapora n	Rp 345.106.00 0	12 Lapora n	Rp 286.105.00 0	100%	82,90%	24 Laporan	Rp 531.400.000	40,00 %	354,27 %		
	4.02.02.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Lapora n	Rp 300.000. 000	12 Laporan	Rp 552.565. 000	12 Lapora n	Rp 327.961.00 0	12 Lapora n	Rp 263.273.00 0	100%	80,28%	24 Laporan	Rp 815.838.000	40,00 %	271,95 %		
	4.02.02.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Lapora n	Rp 150.000. 000	12 Laporan	Rp 256.140. 000	Lapora n	Rp -	Lapora n	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	12 Laporan	Rp 256.140.000	20,00 %	170,76 %		

	4.02.02.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20 Laporan	Rp 100.000.000	4 Laporan	Rp 110.575.000	6 Laporan	Rp -	6 Laporan	Rp -	100%	#DIV/0!	10 Laporan	Rp 110.575.000	50,00 %	110,58 %		
	4.02.02.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	60 Laporan	Rp 100.000.000	12 Laporan	Rp 4.850.000	12 Laporan	Rp -	12 Laporan	Rp -	100%	#DIV/0!	24 Laporan	Rp 4.850.000	40,00 %	4,85%		
	4.02.02.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	25 Laporan	Rp 500.000.000	4 Laporan	Rp 167.660.000	1 Laporan	Rp 107.540.000	1 Laporan	Rp 56.874.000	100%	52,89%	5 Laporan	Rp 224.534.000	20,00 %	44,91 %		

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) adalah 98,15% yang didukung oleh capaian penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.670.392.080 atau 88,37% dari pagu anggaran. Walaupun capaian kinerja dan anggaran tidak mencapai target 100%, namun hal ini menginterpretasikan bahwa capaian tersebut harus dipertahankan sampai pada akhir tahun Renstra untuk mencapai 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran tersebut adalah kondisi keuangan daerah yang tidak mencapai target penerimaan pada triwulan III dan IV. Terutama dalam sub kegiatan bersumber dana PAD yang tidak mencapai target penerimaan sampai pada akhir tahun 2024. Sehingga mengakibatkan dana belanja habis pakai/operasional kantor tidak direalisasikan dan menimbulkan hutang belanja pada akhir tahun anggaran 2024
- 2) Pada sasaran strategis 2 (dua) nilai indeks capaian kinerjanya adalah 98,91 yang didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 5.411.916.800 atau 84,01% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran dibawah 90% pada tahun 2024 ini disebabkan karena sub kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi DPRD bersumber dana PAD. Sama halnya pada sasaran srategis 1 (satu) bahwa dana PAD tidak mencapai target realisasi penerimaan sehingga menyebabkan beberapa sub kegiatan yang tidak direalisasikan jenis belanjanya.

APBD induk Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali Pergeseran anggaran, dan Sekretariat DPRD tidak melakukan pergeseran anggaran. Pada APBD Perubahan terjadi penambahan dan pengurangan pagu anggaran pada kedua program tersebut diatas untuk dioptimalkan dan ditata kembali menurut peruntukannya. Hal ini dilakukan agar mencukupkan setiap pagu anggaran pada sub kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi DPRD dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah, kegiatan bimbingan teknis dan Orientasi DPRD periode 2024-2029, serta fasilitasi rapat DPRD dalam rangka pembahasan anggaran dan evaluasi triwulanan dengan mitra kerja. Sehingga pada APBD Perubahan ini pagu anggaran Sekretariat DPRD mengalami kenaikan 8,86% dari pagu induk atau bertambah sebesar Rp. 2.742.992.627,-. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada target pencapaian kinerja pada tahun 2024. Dengan bertambahnya pagu anggaran tersebut kiranya dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang sudah ditentukan pada Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.

Dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan dan realisasi seperti pada tabel 2.1 diatas tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidakberhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang

tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ini dijelaskan faktor-faktor tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target kinerja.

Tabel 2.1.1. Faktor-Faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	TIDAK TERCAPAI TARGET	TERPENUHI TARGET	MELEBIHI TARGET
1.	Perencanaan dan Anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal
2.	Sumberdaya Aparatur	Kurangnya Kualitas Aparatur, Kurangnya Disiolin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnya Disiplin	Meningkatnya Kualitas Aparatur, Meningkatnya Disiplin
3.	Sarana dan Prasarana	Belum Maksimal dan Memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bimtek	Peningkatan Bimtek	Peningkatan Bimtek
5.	Pendidikan Formal (Bidang, Hukum, Komputer, Akuntansi)	Kurang/Tidak sesuai Bidang	Sesuai Bidang	Peningkatan Aparatur sesuai Bidang
6.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dari tabel diatas terutama faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

- 1) Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan. Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) Faktor sumberdaya aparatur berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan minimnya kualitas aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan, kurangnya disiplin mengakibatkan minimnya rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Faktor Sarana dan prasarana berimplikasi pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja aparatur, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya;

- 4) Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalisme aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bimtek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan;
- 5) Faktor pendidikan formal berimplikasi pada kurang profesionalisme dibidangnya, kurangnya pemahaman diakibatkan tidak sesuai kinerja aparatur dengan latar belakang pendidikan dan Lemahnya pemahaman terhadap Tupoksi aparatur;
- 6) Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuai jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran serta kurangnya konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
- 7) Faktor Monitoring dan Evaluasi berimplikasi pada kualitas pelaksanaan program dan kegiatan hasilnya kurang baik, sehingga akan berdampak pada target dan tujuan renstra perangkat daerah.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD;
- 2) Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya anggaran operasional yang cukup;
- 3) Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.
- 4) Tersedianya Tata Tertib DPRD Berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 5) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- 6) Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
- 7) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
- 8) Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun sesuai dengan latar belakang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer dan lainnya).

- 9) Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 10) Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) progam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 21 sub kegiatan, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 7 kegiatan dengan 31 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, maka tabel dibawah ini menampilkan realisasi keuangan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Renja dan Renstra Sekretariat DPRD.

Tabel 2.1.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		REALISASI		SISA	%
		SUB KEGIATAN/BELANJA	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (4+5)-(6+7)$	$9 = (4+5)/(6+7)*100\%$
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.757.730.176,00	58.044.000,00	17.283.298.518,00	58.044.000,00	1.474.431.658,00	92,16%
1	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.315.000,00	-	7.920.000,00	-	16.395.000,00	32,57%
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.210.000,00	-	3.580.000,00	-	3.630.000,00	49,65%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.860.000,00	-	720.000,00	-	2.140.000,00	25,17%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.400.000,00	-	1.600.000,00	-	800.000,00	66,67%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.950.000,00	-	1.260.000,00	-	690.000,00	64,62%
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.580.000,00	-	1.220.000,00	-	5.360.000,00	18,54%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.100.000,00	-	1.220.000,00	-	880.000,00	58,10%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.480.000,00	-	-	-	4.480.000,00	0,00%
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.525.000,00	-	3.120.000,00	-	7.405.000,00	29,64%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.320.000,00	-	-	-	2.320.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.005.000,00	-	3.120.000,00	-	3.885.000,00	44,54%

2	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.729.423.434,00	-	2.670.548.434,00	-	58.875.000,00	97,84%
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.714.149.434,00	-	2.667.718.434,00	-	46.431.000,00	98,29%
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.528.673.077,00	-	1.528.173.077,00	-	500.000,00	99,97%
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	159.230.994,00	-	159.230.994,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.050.000,00	-	112.050.000,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.920.000,00	-	57.920.000,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.380.160,00	-	90.380.160,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.673.601,00	-	4.573.601,00	-	100.000,00	97,86%
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.547,00	-	19.547,00	-	1.000,00	95,13%
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	63.913.701,00	-	63.913.701,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.156.204,00	-	3.156.204,00	-	-	100,00%
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.468.650,00	-	9.468.650,00	-	-	100,00%
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	663.721.940,00	-	618.938.968,00	-	44.782.972,00	93,25%
	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	20.940.560,00	-	19.893.532,00	-	1.047.028,00	95,00%
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.024.000,00	-	2.830.000,00	-	9.194.000,00	23,54%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.274.000,00	-	-	-	1.274.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.500.000,00	-	1.900.000,00	-	7.600.000,00	20,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000,00	-	930.000,00	-	320.000,00	74,40%
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.250.000,00	-	-	-	3.250.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	610.000,00	-	-	-	610.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	0,00%

	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.440.000,00	-	-	-	1.440.000,00	0,00%
3	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.208.000,00	-	-	-	72.208.000,00	0,00%
	2.21.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuh Barang Milik Daerah SKPD	68.268.000,00	-	-	-	68.268.000,00	0,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan Dinas Biasa	68.268.000,00	-	-	-	68.268.000,00	0,00%
	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.940.000,00	-	-	-	3.940.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.240.000,00	-	-	-	2.240.000,00	0,00%
4	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.736.000,00	-	177.350.000,00	-	72.386.000,00	71,01%
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	131.932.000,00	-	109.600.000,00	-	22.332.000,00	83,07%
	5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	27.750.000,00	-	27.750.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.014.000,00	-	50.000.000,00	-	14.000,00	99,97%
	5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	22.200.000,00	-	-	-	22.200.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	31.968.000,00	-	31.850.000,00	-	118.000,00	99,63%
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.500.000,00	-	860.000,00	-	5.640.000,00	13,23%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	-	-	-	1.230.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.770.000,00	-	860.000,00	-	910.000,00	48,59%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	0,00%
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	111.304.000,00	-	66.890.000,00	-	44.414.000,00	60,10%
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	-	15.000.000,00	-	35.000.000,00	30,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.304.000,00	-	51.890.000,00	-	9.414.000,00	84,64%

5	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.501.262,00	-	391.716.592,00	-	358.784.670,00	52,19%
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.280.612,00	-	612.330,00	-	4.668.282,00	11,60%
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.280.612,00	-	612.330,00	-	4.668.282,00	11,60%
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.638.300,00	-	-	-	100.638.300,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	0,00%
	5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.098.000,00	-	-	-	91.098.000,00	0,00%
	5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.040.300,00	-	-	-	2.040.300,00	0,00%
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.711.000,00	-	-	-	7.711.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.705.000,00	-	-	-	3.705.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.720.000,00	-	-	-	1.720.000,00	0,00%
	5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.286.000,00	-	-	-	2.286.000,00	0,00%
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.990.600,00	-	-	-	102.990.600,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.990.600,00	-	-	-	102.990.600,00	0,00%
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.458.750,00	-	7.387.000,00	-	23.071.750,00	24,25%
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	15.558.750,00	-	-	-	15.558.750,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.400.000,00	-	7.387.000,00	-	13.000,00	99,82%
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	0,00%

	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	218.400.000,00	-	127.175.000,00	-	91.225.000,00	58,23%
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.650.000,00	-	24.310.000,00	-	10.340.000,00	70,16%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	135.750.000,00	-	70.465.000,00	-	65.285.000,00	51,91%
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00	-	32.400.000,00	-	600.000,00	98,18%
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.022.000,00	-	256.542.262,00	-	28.479.738,00	90,01%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285.022.000,00	-	256.542.262,00	-	28.479.738,00	90,01%
6	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	58.044.000,00	-	58.044.000,00	-	100,00%
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	58.044.000,00	-	58.044.000,00	-	100,00%
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	36.954.000,00	-	36.954.000,00	-	100,00%
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	9.990.000,00	-	9.990.000,00	-	100,00%
	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	100,00%
7	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.642.000,00	-	380.859.195,00	-	405.782.805,00	48,42%
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.932.000,00	-	37.849.195,00	-	39.082.805,00	49,20%
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	76.932.000,00	-	37.849.195,00	-	39.082.805,00	49,20%
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.580.000,00	-	6.660.000,00	-	14.920.000,00	30,86%
	5.1.02.02.04.0115	Belanja Jasa Tata Rias	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00	0,00%
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.680.000,00	-	6.660.000,00	-	7.020.000,00	48,68%
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	688.130.000,00	-	336.350.000,00	-	351.780.000,00	48,88%
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.380.000,00	-	12.900.000,00	-	15.480.000,00	45,45%
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	151.800.000,00	-	55.200.000,00	-	96.600.000,00	36,36%

	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	236.500.000,00	-	117.750.000,00	-	118.750.000,00	49,79%
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	186.200.000,00	-	104.000.000,00	-	82.200.000,00	55,85%
	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.500.000,00	-	33.000.000,00	-	27.500.000,00	54,55%
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.750.000,00	-	13.500.000,00	-	11.250.000,00	54,55%
8	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.897.500,00	-	5.180.000,00	-	33.717.500,00	13,32%
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.737.500,00	-	5.180.000,00	-	13.557.500,00	27,65%
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.737.500,00	-	5.180.000,00	-	13.557.500,00	27,65%
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.160.000,00	-	-	-	20.160.000,00	0,00%
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.160.000,00	-	-	-	20.160.000,00	0,00%
9	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.339.184.980,00	-	12.996.749.458,00	-	342.435.522,00	97,43%
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.770.570.830,00	-	12.649.874.458,00	-	120.696.372,00	99,05%
	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	536.340.000,00	-	534.870.000,00	-	1.470.000,00	99,73%
	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.200.000,00	-	33.686.100,00	-	2.513.900,00	93,06%
	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	50.000.000,00	-	46.566.060,00	-	3.433.940,00	93,13%
	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	47.139.000,00	-	46.725.000,00	-	414.000,00	99,12%
	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	777.814.500,00	-	775.561.500,00	-	2.253.000,00	99,71%
	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.112.750,00	-	57.520.050,00	-	16.592.700,00	77,61%
	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.983.425,00	-	6.912.150,00	-	2.071.275,00	76,94%
	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.839.600.000,00	-	1.839.600.000,00	-	-	100,00%

	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	296.100.000,00	-	296.100.000,00	-	-	100,00%
	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	233.067.913,00	-	225.276.132,00	-	7.791.781,00	96,66%
	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.379.634,00	-	48.501.826,00	-	1.877.808,00	96,27%
	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.443.604,00	-	1.121.400,00	-	322.204,00	77,68%
	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.600.004,00	-	3.364.240,00	-	235.764,00	93,45%
	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.674.400.000,00	-	3.631.400.000,00	-	43.000.000,00	98,83%
	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.793.000.000,00	-	4.782.000.000,00	-	11.000.000,00	99,77%
	5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	237.510.000,00	-	237.510.000,00	-	-	100,00%
	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	-	83.160.000,00	-	27.720.000,00	75,00%
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	568.614.150,00	-	346.875.000,00	-	221.739.150,00	61,00%
	5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	568.614.150,00	-	346.875.000,00	-	221.739.150,00	61,00%
10	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	766.822.000,00	-	652.974.839,00	-	113.847.161,00	85,15%
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	726.422.000,00	-	650.734.839,00	-	75.687.161,00	89,58%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	726.422.000,00	-	650.734.839,00	-	75.687.161,00	89,58%
	4.02.01.2.16.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	40.400.000,00	-	2.240.000,00	-	38.160.000,00	5,54%
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.900.000,00	-	-	-	8.900.000,00	0,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.500.000,00	-	2.240.000,00	-	29.260.000,00	7,11%

	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.149.022.000,00	-	9.740.966.362,00	-	2.408.055.638,00	80,18%
11	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	787.645.000,00	-	678.374.000,00	-	109.271.000,00	86,13%
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.485.000,00	-	-	-	8.485.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.865.000,00	-	-	-	1.865.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.260.000,00	-	-	-	2.260.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.360.000,00	-	-	-	4.360.000,00	0,00%
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	616.514.000,00	-	563.175.000,00	-	53.339.000,00	91,35%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.505.000,00	-	-	-	1.505.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.945.000,00	-	-	-	1.945.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.850.000,00	-	-	-	2.850.000,00	0,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	610.214.000,00	-	563.175.000,00	-	47.039.000,00	92,29%
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	162.646.000,00	-	115.199.000,00	-	47.447.000,00	70,83%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.173.000,00	-	-	-	1.173.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.995.000,00	-	-	-	2.995.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.800.000,00	-	-	-	3.800.000,00	0,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.678.000,00	-	115.199.000,00	-	39.479.000,00	74,48%
12	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	662.542.000,00	-	417.413.000,00	-	245.129.000,00	63,00%
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	41.775.000,00	-	41.775.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.425.000,00	-	17.425.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.350.000,00	-	24.350.000,00	-	-	100,00%
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.775.000,00	-	13.595.000,00	-	28.180.000,00	32,54%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.425.000,00	-	13.595.000,00	-	3.830.000,00	78,02%

	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.350.000,00	-	-	-	24.350.000,00	0,00%
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	226.266.000,00	-	39.400.000,00	-	186.866.000,00	17,41%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.425.000,00	-	15.060.000,00	-	2.365.000,00	86,43%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.350.000,00	-	24.340.000,00	-	10.000,00	99,96%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184.491.000,00	-	-	-	184.491.000,00	0,00%
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	248.656.000,00	-	241.573.000,00	-	7.083.000,00	97,15%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.425.000,00	-	17.420.000,00	-	5.000,00	99,97%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.350.000,00	-	18.850.000,00	-	5.500.000,00	77,41%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.881.000,00	-	205.303.000,00	-	1.578.000,00	99,24%
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	56.750.000,00	-	55.890.000,00	-	860.000,00	98,48%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.750.000,00	-	55.890.000,00	-	860.000,00	98,48%
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	47.320.000,00	-	25.180.000,00	-	22.140.000,00	53,21%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.320.000,00	-	13.180.000,00	-	140.000,00	98,95%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.000.000,00	-	12.000.000,00	-	22.000.000,00	35,29%
13	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.108.568.000,00	-	847.004.000,00	-	261.564.000,00	76,41%
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	327.961.000,00	-	240.752.000,00	-	87.209.000,00	73,41%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.156.000,00	-	-	-	2.156.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.000,00	-	-	-	2.770.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.255.000,00	-	-	-	2.255.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.725.000,00	-	20.725.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.055.000,00	-	220.027.000,00	-	80.028.000,00	73,33%
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	345.106.000,00	-	286.105.000,00	-	59.001.000,00	82,90%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.156.000,00	-	-	-	2.156.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.000,00	-	-	-	2.770.000,00	0,00%

	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.255.000,00	-	-	-	2.255.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.725.000,00	-	20.720.000,00	-	5.000,00	99,98%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	317.200.000,00	-	265.385.000,00	-	51.815.000,00	83,66%
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	327.961.000,00	-	263.273.000,00	-	64.688.000,00	80,28%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.156.000,00	-	-	-	2.156.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.770.000,00	-	-	-	2.770.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.255.000,00	-	-	-	2.255.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.725.000,00	-	20.725.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.055.000,00	-	242.548.000,00	-	57.507.000,00	80,83%
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	107.540.000,00	-	56.874.000,00	-	50.666.000,00	52,89%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.005.000,00	-	-	-	2.005.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.555.000,00	-	10.650.000,00	-	1.905.000,00	84,83%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.000.000,00	-	22.040.000,00	-	11.960.000,00	64,82%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.480.000,00	-	24.184.000,00	-	32.296.000,00	42,82%
14	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.237.306.000,00	-	1.914.885.800,00	-	322.420.200,00	85,59%
	4.02.02.2.04.02	Orientasi DPRD	588.776.000,00	-	587.380.000,00	-	1.396.000,00	99,76%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.140.000,00	-	19.000.000,00	-	140.000,00	99,27%
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserakan kepada Masyarakat	15.500.000,00	-	15.500.000,00	-	-	100,00%

	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.000.000,00	-	62.000.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	-	9.350.000,00	-	1.200.000,00	88,63%
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	338.086.000,00	-	338.030.000,00	-	56.000,00	99,98%
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	528.880.000,00	-	511.739.700,00	-	17.140.300,00	96,76%
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	403.880.000,00	-	386.739.700,00	-	17.140.300,00	95,76%
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	162.000.000,00	-	108.000.000,00	-	54.000.000,00	66,67%
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	162.000.000,00	-	108.000.000,00	-	54.000.000,00	66,67%
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	258.950.000,00	-	123.942.000,00	-	135.008.000,00	47,86%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	258.950.000,00	-	123.942.000,00	-	135.008.000,00	47,86%
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	698.700.000,00	-	583.824.100,00	-	114.875.900,00	83,56%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	116.880.000,00	-	100.130.000,00	-	16.750.000,00	85,67%
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000,00	-	-	-	27.000.000,00	0,00%
	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	100,00%
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	35.820.000,00	-	35.520.000,00	-	300.000,00	99,16%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	467.800.000,00	-	398.174.100,00	-	69.625.900,00	85,12%
15	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.532.110.000,00	-	1.447.849.000,00	-	84.261.000,00	94,50%
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.532.110.000,00	-	1.447.849.000,00	-	84.261.000,00	94,50%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	-	-	-	3.025.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.625.000,00	-	-	-	2.625.000,00	0,00%

	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	631.350.000,00	-	609.100.000,00	-	22.250.000,00	96,48%
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	345.600.000,00	-	303.150.000,00	-	42.450.000,00	87,72%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	546.810.000,00	-	535.599.000,00	-	11.211.000,00	97,95%
16	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	113.606.000,00	-	106.391.000,00	-	7.215.000,00	93,65%
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	113.606.000,00	-	106.391.000,00	-	7.215.000,00	93,65%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.606.000,00	-	106.391.000,00	-	7.215.000,00	93,65%
17	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.707.245.000,00	-	4.329.049.562,00	-	1.378.195.438,00	75,85%
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.710.553.000,00	-	3.273.369.462,00	-	437.183.538,00	88,22%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.710.553.000,00	-	3.273.369.462,00	-	437.183.538,00	88,22%
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13.570.000,00	-	11.205.000,00	-	2.365.000,00	82,57%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.570.000,00	-	11.205.000,00	-	2.365.000,00	82,57%
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.974.722.000,00	-	1.044.475.100,00	-	930.246.900,00	52,89%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.621.302.000,00	-	879.271.100,00	-	742.030.900,00	54,23%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	353.420.000,00	-	165.204.000,00	-	188.216.000,00	46,74%
	4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8.400.000,00	-	-	-	8.400.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	-			8.400.000,00	0,00%
		TOTAL	30.906.752.176,00	58.044.000,00	27.024.264.880,00	58.044.000,00	3.882.487.296,00	87,46%

Secara keseluruhan realisasi anggaran untuk menunjang sasaran strategis Sekretariat DPRD yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Belanja sebesar Rp. 27.082.308.880, atau 87,46% dari pagu anggaran Rp. 30.964.796.176, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 3.882.487.296. Adapun sisa anggaran yang sangat besar disebabkan karena :

- ❖ Realisasi penerimaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024 tidak mencapai target, sehingga menyebabkan beberapa sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak dapat direalisasikan;
- ❖ Terdapat 1 (satu) paket kegiatan Pengadaan Atribut PIN DPRD yang mengalami putus kontrak karena sampai berakhirnya kontrak hanya 13 buah PIN yang dibuat. Sehingga realisasi anggaran hanya uang muka 50%;
- ❖ Penambahan pagu pada Perubahan APBD sebesar Rp. 2.742.992.627 yang tidak memperhitungkan realisasi penerimaan dana PAD sejak awal Januari 2024. Sehingga menyebabkan anggaran tersebut tertata pada APBD namun realisasinya tidak mencapai sebesar penambahan pagu tersebut;
- ❖ Alokasi penggunaan dana DAU difokuskan pada pembiayaan dana Hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 sehingga menyebabkan terhambatnya realisasi anggaran operasional kantor khususnya barang habis pakai dan belanja pegawai, yaitu belanja tambahan penghasilan PNS;
- ❖ Proses pembuatan surat pesanan dalam aplikasi *e-catalog* yang begitu rumit sehingga belanja barang habis pakai yang terdiri atas belanja ATK, Cetak/Penggunaan, Kertas/Cover, Makan-Minum Rapat/Tamu, dan belanja lainnya lambat direalisasikan.

Adapun realisasi anggaran dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.815.774.176, realisasi sebesar Rp. 17.341.342.518 atau 92,16%, dan sisa anggaran Rp. 1.474.431.658 atau 7,84% dari pagu anggaran untuk membiayai 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan;
- ❖ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.149.022.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.740.966.362 atau 80,18%, dan sisa anggaran Rp. 2.408.055.638 atau 19,82% dari pagu anggaran untuk membiayai 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS	KET
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TW I TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Agenda DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu		Persentase Agenda DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	98,15%	22,22%	100,00 %	100,00%	Dari 54 Agenda DPRD, 12 Agenda yang telah diselesaikan tepat waktu	
			% Agenda Pembahasan Dewan Yang Terlaksana Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	98,15%	22,22%	100,00 %	100,00%	Dari 54 Agenda DPRD, 12 Agenda yang telah dibahas tepat waktu	
			% Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu	75%	80%	85%	90%	98,15%	6,10%	85,00%	90,00%	Dari 54 Agenda DPRD, 12 Agenda sudah difasilitasi dengan baik dan tepat waktu	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	7 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	7 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD telah dibuat	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	1 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	1 Dokumen Perencanaan (RENJA 2025) dan 2 Dokumen Penganggaran (RKA & DPA) telah disusun	

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	5 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2023 & 2 Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja bulanan telah disusun
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara triwulanan telah disusun
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	630 Dokumen	630 Dokumen	630 Dokumen	630 Dokumen	585 Dokumen	32 Dokumen	630 Dokumen	630 Dokumen	32 Dokumen Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD telah dibuat
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	38 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	38 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	38 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	36 Orang/12 Bulan Gaji PNS & Gaji 13/THR & TBK/12 Bulan	35 Orang/5 Bulan, Gaji THR,	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	35 Orang ASN Setwan telah menerima Gaji dan Tunjangan Bulan Januari s/d Februari 2024
Jumlah Dokumen yang telah di tatusahkan, dan telah di Uji/Verifikasi	600 Dokumen SPP & SPM	600 Dokumen SPP & SPM	600 Dokumen SPP & SPM	600 Dokumen SPP & SPM	363 Dokumen SPP & SPM	122 Dokumen SPP & SPM	600 Dokumen SPP & SPM	600 Dokumen SPP & SPM	29 Dokumen SPP & SPM sudah ditatusahkan dan telah diverifikasi
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang telah disediakan, dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan Keuangan	18 Laporan Keuangan	18 Laporan Keuangan	18 Laporan Keuangan	18 Laporan Keuangan	5 Laporan Keuangan	4 Laporan Keuangan	18 Laporan Keuangan	1 Laporan Keuangan tahun 2023 dan 3 Laporan Keuangan Bulanan 2024 telah dibuat

Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	3 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	3 Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD telah dibuat	
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 2 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/5 Bulan, THR, 1 kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	3 Pimpinan dan 22 Anggota DPRD telah menerima Gaji dan Tunjangan Bulan Januari, dan Bulan Februari khusus Anggota DPRD hanya 21 orang yang menerima, serta Tunjangan Reses ke-1 hanya 23 Orang yang menerima	
Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	2 Paket	4 Paket	1 Paket	-	5 Paket	4 Paket	3 Paket Pengadaan : 1 Paket PIN DPRD dan 2 Paket Pakaian Dinas PSL & PSR DPRD sementara tahapan penyusunan dokumen kontrak	
Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	5 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	4 Dokumen Layanan Administrasi DPRD telah dibuat	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Bulan Januari dan Februari telah dibuat	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	2 Paket Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Bulan Januari dan Februari telah disediakan	

	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	13 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	13 Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD telah dibuat	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	45 Dokumen	45 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	5 Dokumen	50 Dokumen	45 Dokumen	6 Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Komisi DPRD telah dibuat	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen Pelaksanaan Banmus telah dibuat	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	54 Dokumen	54 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	5 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	6 Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD telah dibuat	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum ada Dokumen Hasil Pelaksanaan Pansus DPRD	
	% Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik	75%	80%	85%	90%	69,00%	2,87%	90,00%	95%	Bagian Admin sementara mengupayakan Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Kesekretariatan DPRD	
	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	2 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	2 Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD telah dibuat	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi yang telah dilaksanakan, dan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah yang telah disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	5 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	1 Laporan Rekonsiliasi BMD dan 1 Laporan Penyusunan BMD Tahun 2023 telah dibuat	

Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	9 Dokumen	83 Dokumen	83 Dokumen	9 Dokumen Administrasi Umum Sekretariat DPRD telah dibuat dan disediakan	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang telah Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	4 Paket	-	5 Paket	5 Paket	1 Paket Pengadaan Alat/Bahan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor telah disediakan	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah disediakan	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang telah Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	1 Paket Pengadaan Logistik Kantor telah disediakan	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang telah Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	2 Paket	20 Paket	20 Paket	1 Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan telah disediakan	
Jumlah Bahan/Material yang telah Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	Belum disediakan Paket Pengadaan Bahan/Material	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	2 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	2 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu telah dibuat	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	35 Laporan	3 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	3 Laporan Penyelenggaraan Rakoord SKPD telah dibuat	

Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	Sementara dilakukan Penyusunan Dokumen Kontrak	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	8 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6 Unit	-	10 Unit	10 Unit	Pengadaan LCD Projektor dan Mesin Printer masih sementara penyusunan Dokumen Kontrak	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530 Laporan	530 Laporan	530 Laporan	530 Laporan	530 Laporan	4 Laporan	530 Laporan	530 Laporan	4 Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dibuat	
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	-	500 Laporan	500 Laporan	Belum disediakannya Pengadaan Meterai untuk Surat-Menyurat dan SPJ	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan Penyediaan Jasa Listrik Bulan Januari s/d Februari telah dibuat	
Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	Belum disediakannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL dan Non ASN) sudah dibuat	
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	9 Unit	4 Unit	17 Unit	17 Unit	4 Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dipelihara	
Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit Kendaraan Dinas Jabatan telah dipelihara	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	6 Unit	50 Unit	50 Unit	1 Unit Mesin Generator Set Kantor dan 5 AC telah dipelihara	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit	2 Unit AC Kantor telah dipelihara	
			% SDM Aparatur Setwan Yang Bersertifikat Keahlian)	80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	3 Orang ASN Setwan telah mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas	
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	5 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	5 Dokumen Administrasi Kepegawaian telah dibuat	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	-	-	35 Paket	35 Paket	Paket Pengadaan Pakaian Dinas ASN Setwan sementara penyusunan dokumen kontrak	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	2 Orang	3 Orang	6 Orang	6 Orang	3 Orang telah Mengikuti Cocahing Clinic SIMDA F-MIS	
2.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	77	79	80	85	79,13	5	85	90		

	DPRD												
			% Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD	90%	95%	100%	100%	100,00 %	0,00%	100,00 %	100,00%		
			% Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah	90%	95%	100%	90%	75,00%	0,00%	85,00%	90,00%	Dari 54 Agenda DPRD, 12 Agenda sudah difasilitasi dengan baik dan tepat waktu	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD telah dibuat	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen Pembahasan BAPEMPERDA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	Belum adanya Ranperda yang dibahas	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen Perubahan Perbup terkait Perjalanan Dinas	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	Belum adanya NA yang difasilitasi	

Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen		
Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	Belum adanya Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara oleh BK	
Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	23 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen		
Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	74 Dokumen	23 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	Dua Anggota DPRD belum melaksanakan kegiatan Reses DPRD	
% Anggota DPRD Yang Bersertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas	90%	95%	100%	90%	75,00%	0,00%	85,00%	90,00%		
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen		
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Orientasi dilakukan sekali dalam awal masa jabatan DPRD	
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Pendalaman Tugas dilakukan pada awal Tahun 2024 oleh PDIP dan Demokrat	
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen		

	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/2 Bulan	6 Orang/12 Bulan	6 Orang/12 Bulan	Pembayaran Honoror Tenaga Ahli Fraksi sudah dilakukan pada Bulan Januari dan Februari	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1 Kegiatan Penyelenggaraan Humas yaitu Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2024 oleh DPRD pada Dapil masing-masing	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen Rencana Kerja Tahunan diusulkan oleh DPRD	
	% PERDA Yang diterbitkan Tepat Waktu	90%	95%	100%	100%	66,67%	0,00%	100,00 %	100,00%		
	% Temuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Ditindaklanjuti oleh DPRD tepat waktu	90%	95%	100%	100%	66,67%	0,00%	100%	100%		
	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		

			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Evaluasi dan Hasil Pembahasan Realisasi Anggaran dan Kinerja Semester II dan Tahunan dengan Mitra Kerja sudah dilakukan	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	43 Laporan	6 Laporan	43 Laporan	43 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Berkaitan dengan Tugas Pokok tersebut, Sekretariat DPRD harus menguasai pengetahuan dasar untuk mendukung kerja-kerja DPRD. Misalnya, sebelum DPRD membahas Rancangan Perda, Sekretariat DPRD telah menyiapkan Rancangan Perda, Naskah Akademik dan tata pendukung yang relevan dengan peraturan daerah, sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan sebagai berikut :

- Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam dukungan terhadap Kinerja DPRD;
- Penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana;
- Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan substansi pada DPRD;
- DPRD yang mampu menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban;
- Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun laporan pertanggungjaaban;
- Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas anggota DPRD baru.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Struktur Organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD, disamping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Dengan memberikan fasilitasi pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini,

namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari masing-masing bagian karena dianggap sebagai hal yang kurang penting;
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
3. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
4. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).

5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan;
6. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi DPRD;
7. Upaya mensinergikan koordinasi antara Legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya Perda inisiatif DPRD yang dihasilkan karena tidak seluruh Ranperda inisiatif DPRD disetujui untuk dijadikan Perda;
8. Kurangnya sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
9. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD;
10. Masih sering terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam setiap penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
11. Masih belum tersedianya fasilitas informasi Yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun sebagai lembaga.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD juga mengidentifikasi permasalahan dari sisi Pendukung dan Penghambat yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*thread*). Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD, berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup;
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur;
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Ancaman/Tantangan :

- a. Adanya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah;
- b. Adanya perkembangan Globalisasi yang serba Elektronik Baik Pelaporan dan Perencanaan;
- c. Adanya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

2.3.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD menjadikan seluruh Perangkat Daerah menjadi kelompok sasaran layanan khususnya dalam memfasilitasi rapat-rapat yang dilakukan Bersama dengan Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baik dalam bentuk mewujudkan suatu perencanaan, penganggaran, pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi.

2.3.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Sekretariat DPRD dalam meningkatkan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD menjalin kerjasama atau bermitra dengan dengan layanan media baik media *online* dan media cetak khususnya dalam penayangan atau publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD agar diketahui dan membuka informasi kepada masyarakat luas terkait dengan hasil kinerja DPRD

setiap bulannya serta hasil kinerja Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

2.3.6. Isu-isu Penting dan Strategis Nasional Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Tekad dan semangat Indonesia menjadi negara maju jelas tertuang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025–2045. Adapun Permasalahan dan Isu strategis nasional dapat diikuti pada Gambar 2.3



Gambar 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Nasional (Sumber Bappenas, 2023)

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dikelompokkan dalam 5 aspek :

- 1) Aspek standar social budaya, IPTEK dan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Aspek ekonomi - pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3) Aspek pemerataan pembangunan;
- 4) Aspek pemantapan tata kelola pemerintahan;
- 5) Aspek pengembangan infrastruktur yang mendukung geoposisi dan geostrategis.

Aspek standar social budaya, IPTEK dan kesejahteraan social meliputi: percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas Pendidikan; peningkatan derajat dan pemerataan Kesehatan; percepatan dan pengentasan kemiskinan; kecukupan pangan berkualitas; peningkatan peran kebudayaan dan kearifan lokal; dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek ekonomi-pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, meliputi: Penguatan struktur ekonomi industri ditopang sektor primer yang kuat; kecukupan sumberdaya air dan energi terbarukan; pemantapan lingkungan hidup berbasis green, bule economy dan konservasi; pemantapan antisipasi bencana dan perubahan iklim; pemberdayaan koperasi, UMKM, kewirausahaan serta ekonomi kreatif;

pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi kondusif; dan pengembangan pariwisata dan perhubungan yang terintegrasi

Aspek pemerataan pembangunan, meliputi: percepatan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan; pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi; dan kesetaraan antara wilayah daratan, kepulauan dan perbatasan.

Aspek pemantapan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, meliputi: pemantapan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi; supremasi hukum; regulasi yang fleksibel dan produktif serta adaptif; kapasitas PAD dan sumber pembiayaan yang memadai; komitmen kepatuhan tata ruang; keamanan dan ketertiban masyarakat; dan Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Aspek pengembangan infrastruktur yang mendukung geoposisi dan geostrategis, meliputi: percepatan pengembangan infrastruktur ekonomi; percepatan pengembangan infrastruktur penunjang social; percepatan pengembangan infrastruktur digital; percepatan deteksi bencana, early warning system (EWS) dan Mitigasi; dan pemantapan konektivitas.

Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Talaud juga memperhatikan 5 (lima) aspek sesuai dengan Provinsi Sulawesi Utara, dan Sekretariat DPRD sebagai Organisasi yang memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD memilih aspek yang ke-4 (empat), yaitu **Aspek Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan**. Adapun isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu dengan memperhatikan aspek Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, terdiri atas :

- 1) **Pemantapan Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi** Dinamika demokrasi dan pembangunan telah meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat dan para pihak terhadap pelayanan publik. Seiring ketatnya era persaingan memberikan konsekuensi terhadap tuntutan pelayanan public pemerintah yang efisien, efektif, produktif dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu reformasi birokrasi semakin serius untuk percepatan, dikarenakan keadaan ini juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) **Pemantapan Kesadaran dan Supremasi Hukum**
Kesadaran hukum menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan pembangunan, namun perlu ditunjang dengan supremasi hukum yang kuat dan konsisten.
- 3) **Regulasi yang Fleksibel, Produktif dan Adaptif**
Produk regulasi atau kebijakan perlu disusun dengan pentahapan dan landasan substantif serta sistematis yang jelas agar efektif diterapkan. Kemudian diharapkan dapat produktif dan fleksibel menghadapi perubahan dinamika sehingga adaptif dan menunjang keberlanjutan.

4) **Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak**

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan selama ini tidak lepas dari Kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan berbagai pihak; baik antar pemerintah dalam semua aras, juga dengan para stakeholder dalam dan luar negeri. Disadari bahwa Kerjasama dan kemitraan adalah sinerjitas yang menjadi Solusi dari segala bentuk kendala dalam mengoptimalkan pelayanan public. Sukses penyelenggaraan pariwisata dan berkembangnya investasi baik dalam negeri maupun asing adalah sebagian dampak positif Kerjasama dan kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah.

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045 merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan Misi ke-3 (tiga), yaitu Transformasi Tata Kelola (Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien dan Adaptif). Adapun sampai dengan saat ini belum adanya RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2030 karena belum ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 terpilih oleh KPU, dan masih menunggu hasil sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). Olehnya itu dalam rangka percepatan penyusunan Renja tahun 2026 dapat mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045.

Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :

1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi;
3. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang;
4. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas;
5. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.

6. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap *check and recheck* serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan kebijakan strategis untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu :

a. Rekomendasi terdiri atas :

- 1) Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja guna mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan;
- 3) Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan, terutama anggaran dalam memperbaiki sarana dan prasarana Gedung kantor.

b. Kebijakan strategis terdiri atas :

- 1) Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
- 2) Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
- 3) Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
- 4) Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
- 5) Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
- 7) Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- 8) Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat DPRD belum berorientasi hasil (*outcome*) serta belum memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound* (SMART). Sehingga perlu dilakukan perubahan. Hal ini tentunya dilakukan agar sasaran strategis yang ditentukan outputnya mendukung tujuan Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan berubahnya IKU tersebut, maka sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dapat disesuaikan lagi pada penyusunan Renja tahun 2026 dan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2030.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses review tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang sesuai namun bersarannya berbeda, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RENJA SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM DAN EGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					29.221.803.549					37.000.000.000		
	SEKRETARIAT DPRD			Persentase Agenda Pembahasan Dewan Yang Terlaksana Tepat Waktu	100%	22.783.803.549			Persentase Agenda Pembahasan Dewan Yang Terlaksana Tepat Waktu	100%	29.217.000.000		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			% Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu	85%	17.355.803.549	PROGRANPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		% Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu	85%	18.017.000.000		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Dokumen	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Dokumen	32.000.000	-
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melonguane	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melonguane	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	10.000.000	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	10.000.000	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melonguane	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melonguane	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.000.000	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	630 Dokumen	2.753.803.549	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	630 Dokumen	2.845.000.000	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Melonguane	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	2.710.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Melonguane	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	2.800.000.000	

		02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melonguane	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen SPP & SPM	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melonguane	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen SPP & SPM	20.000.000	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	8.803.549	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	10.000.000	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan Keuangan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan Keuangan	15.000.000	
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD	165 Dokumen	14.020.000.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD	165 Dokumen	14.170.000.000	
		01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Melonguane	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	13.150.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Melonguane	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	13.200.000.000	
		02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	650.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	750.000.000	
		03	Pelaksanaan Medical check Up	Melonguane & Manado	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	220.000.000	Pelaksanaan Medical check Up	Melonguane & Manado	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	220.000.000	
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD			Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	24 Dokumen	550.000.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	24 Dokumen	970.000.000	
		01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	25 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	25 Dokumen	10.000.000	
		02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Melonguane & Manado	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	10.000.000	
		03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Medical check Up	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	850.000.000	

		04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Pelaksanaan Medical check Up	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.165.000.000					7.575.000.000	
	4.02.02.08	Fasilitas Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD	120 Dokumen	4.165.000.000	Fasilitas Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD	120 Dokumen	7.575.000.000	
		01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50 Dokumen	2.500.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	4.500.000.000	
		02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Melonguane	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	5.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Melonguane	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	5.000.000	
		03	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	50.000.000	
		04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	P. Sulawesi, P. Jawa, Kabupaten Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen	1.590.000.000	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	P. Sulawesi, P. Jawa, Kabupaten Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	100 Dokumen	3.000.000.000	
		05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	20.000.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				% Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik	90%	1.058.000.000	PROGRANPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		% Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik	90%	3.358.500.000	
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	65.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	70.000.000	
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	55.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Melonguane & Manado	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	60.000.000	
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melonguane	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melonguane	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	10.000.000	

	4.02.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 Dokumen	502.000.000	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 Dokumen	677.000.000	
		01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Melonguane	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.000.000	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Melonguane	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000	
		02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	50 Paket	40.000.000	
		03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melonguane	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melonguane	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.000.000	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	20.000.000	
		07	Penyediaan Bahan/Material	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Melonguane	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	120.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Melonguane	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	150.000.000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	350.000.000	

4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Dokumen	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Dokumen	850.000.000	
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	-	
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	
	05	Pengadaan Meubel	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Unit	-	Pengadaan Meubel	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	40 Unit	200.000.000	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	4 Unit	350.000.000	
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530 Laporan	391.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530 Laporan	211.500.000	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	98.500.000	
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	8.000.000	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melonguane	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	100.000.000	

	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Unit	1.550.000.000	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melonguane & Manado	Jumlah Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melonguane & Manado	Jumlah Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melonguane & Manado	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melonguane & Manado	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melonguane	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melonguane	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.400.000.000	
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melonguane	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melonguane	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	30.000.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				% SDM Aparatur Setwan Yang Bersertifikat Keahlian	90%	205.000.000	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		% SDM Aparatur Setwan Yang Bersertifikat Keahlian	90%	266.500.000	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 Dokumen	205.000.000	Jumlah Dokumen Kepegawaian Yang dihasilkan		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 Dokumen	266.500.000	
		01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Melonguane & Manado	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000	
		02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	120.000.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Melonguane & Manado	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	150.000.000	
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melonguane	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melonguane	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.500.000	

		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	
	SEKRETARIAT DPRD				Indeks Kepuasan Anggota DPRD	85	6.438.000.000			Indeks Kepuasan Anggota DPRD	85	7.783.000.000	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				% Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD	100%	4.383.000.000			% Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD	100%	5.083.000.000	
					% Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah	100%	3.210.000.000			% Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah	100%	3.665.000.000	
	4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 Dokumen	2.310.000.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 Dokumen	2.605.000.000	
		01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	150.000.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	300.000.000	
		02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	5.000.000	
		03	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2.155.000.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2.300.000.000	
		04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3500 Orang	-	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	3500 Orang	-	
	4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24 Dokumen	750.000.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24 Dokumen	910.000.000	
		01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	120.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	50.000.000	

		02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	60.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	60.000.000	
		03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 Dokumen	450.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 Dokumen	650.000.000	
		04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	120.000.000	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	150.000.000	
		06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3500 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3500 Orang	-	
	4.02.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	150.000.000	
		01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	150.000.000	
					% Anggota DPRD Yang Bersertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas	100%	1.173.000.000			% Anggota DPRD Yang Bersertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas	100%	1.418.000.000	
	4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	20 Dokumen	1.173.000.000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	78	1.418.000.000	
		01	Orientasi DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	Orientasi DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	
		02	Pendalaman Tugas DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	2 Dokumen	350.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	2 Dokumen	65.000.000	
		04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Melonguane	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang/12 Bulan	180.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Melonguane	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang/12 Bulan	180.000.000	
		05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Melonguane	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang/12 Bulan	168.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Melonguane	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang/12 Bulan	168.000.000	

		06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	120.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	250.000.000	
		07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Melonguane	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Melonguane	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	5.000.000	
		08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Kepl. Talaud, Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	350.000.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Kepl. Talaud, Sulawesi Utara	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	750.000.000	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				% Perda Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	2.055.000.000			% Perda Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	2.700.000.000	
					% Temuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Ditindaklanjuti DPRD tepat waktu	100%	2.055.000.000			% Temuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Ditindaklanjuti DPRD tepat waktu	100%	2.700.000.000	
	4.02.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 Dokumen	750.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 Dokumen	830.000.000	
		01	Pembahasan KUA dan PPS	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPS	1 Dokumen	50.000.000	Pembahasan KUA dan PPS	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPS	1 Dokumen	50.000.000	
		02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	50.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	50.000.000	
		03	Pembahasan APBD	Melonguane & Manado	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	260.000.000	Pembahasan APBD	Melonguane & Manado	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	300.000.000	
		04	Pembahasan APBD Perubahan	Melonguane & Manado	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	260.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Melonguane & Manado	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	300.000.000	
		05	Pembahasan Laporan Semester	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	80.000.000	Pembahasan Laporan Semester	Melonguane	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	80.000.000	
		06	Pembahasan Petanggungjawaban APBD	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	50.000.000	Pembahasan Petanggungjawaban APBD	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	50.000.000	

4.02.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah			Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	43 Laporan	1.305.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	43 Laporan	1.870.000.000	
	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	350.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	500.000.000	
	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	450.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	550.000.000	
	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	350.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	500.000.000	
	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	
	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	
	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6 Dokumen	70.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6 Dokumen	100.000.000	
	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	-	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepl. Talaud	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	100.000.000	
	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepl. Talaud & Manado	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	85.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepl. Talaud & Manado	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	120.000.000	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pagu indikatif dalam rancangan awal RKPD tahun 2026 adalah Rp. **29.221.803.549,-** sedangkan kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh Sekretariat DPRD adalah Rp. **37.000.000.000,-**. Adanya perbedaan yang signifikan antara pagu indikatif yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dengan kebutuhan anggaran Sekretariat DPRD karena pada tahun 2026 adalah awal pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang baru dilantik masa jabatan tahun 2024-2029. Hasil analisis kebutuhan pagu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak terlepas dari dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menetapkan bahwa perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*. Melihat kondisi sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD yang belum memadai serta bangunan Sekretariat DPRD yang harus direhabilitasi sehingga membutuhkan anggaran untuk rehabilitasi bangunan kantor, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan Meubel untuk Alat Kelengkapan DPRD. Dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan DPRD terkait besaran pagu yang dibutuhkan oleh DPRD dalam mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Program kegiatan dan sub kegiatan tersebut mampu memberikan pelayanan yang prima kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kebutuhan pagu tersebut harapannya dapat mencapai tujuan Sekretariat DPRD dalam tahun akhir Rencana Strategis (Renstra) sesuai dalam RPJMD Tahun 2020-2026.

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan pagu indikatif yaitu Rp. 18.618.803.549,- digunakan dalam layanan administrasi perkantoran, biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi, biaya peningkatan sarana prasarana kantor, rehabilitasi gedung kantor, layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, layanan pembayaran gaji dan tunjangan DPRD, biaya pelaksanaan medical chek-up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD, dan biaya layanan umum lainnya dalam rangka memfasilitasi semua kebutuhan DPRD. Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kegiatan fasilitasi tugas DPRD dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp. 4.165.000.000,- digunakan untuk membiayai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Perjalanan Dinas Koordinasi Pimpinan DPRD dan Komisi DPRD). Adapun 2 (dua) program tersebut mendukung sasaran strategis yang pertama, yaitu “Terfasilitasinya Kinerja DPRD” dengan indikator kinerjanya adalah “Persentase Agenda Pembahasan Dewan yang terlaksana tepat waktu”.

Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.438.000.000,- digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA),

Badan Anggaran (BANGGAR), Badan Kehormatan (BK), Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD, kegiatan kunjungan kerja DPRD ke dapil masing-masing, Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah oleh Komisi DPRD dalam rangka fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Terdapat pula kegiatan Propemperda yang membahas dan menetapkan rancangan produk peraturan daerah yang dihasilkan dari inisiatif DPRD. Kegiatan yang lainnya yaitu memfasilitasi pembahasan rapat kebijakan anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan dan sub kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai legislatif, yaitu membahas dan menetapkan APBD lewat rapat pembahasan antara BANGGAR dan TAPD, sehingga dapat menghasilkan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada program ini juga terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang memfasilitasi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua sasaran program kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis yang kedua, yaitu “Meningkatkannya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Pelayanan Kesekretariatan DPRD”.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam hal ini perangkat daerah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tupoksinya, maka tidak terdapat Program/Kegiatan dari masyarakat karena DPRD sebagai penyalur aspirasi Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2026 adalah proses peninjauan mendalam terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pencapaian target Renstra. Ini dilakukan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 untuk memastikan bahwa rencana kerja daerah selaras dengan tujuan nasional. Telaahan kebijakan nasional ini penting karena menjadi dasar bagi penyusunan Renja perangkat daerah, memastikan bahwa rencana kerja daerah selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional. Telaahan mencakup prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah. Tujuan utama telaahan adalah untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2026 sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Telaahan melibatkan pemantauan perkembangan regulasi terbaru dan evaluasi kinerja Renja tahun sebelumnya. Hasil telaahan membantu dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, serta dalam perencanaan dan penganggaran yang efektif, sehingga telaahan ini menjadi input penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026, yang merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk satu tahun.

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/*Non State Actors*. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan *goals* periode jangka menengah tahun 2025-2029.

Misi Presiden yang disebut sebagai **Asta Cita** dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 (tujuh), yaitu **memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan** dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 (satu), yaitu **Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkat** serta mendukung pelaksanaan Program Prioritas ke-3 (tiga), yaitu **Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi** yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan kualitas kinerja dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme *check and*

balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Olehnya itu dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD untuk mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan *check and balance* terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

Dari hasil telaahan sinkronisasi kebijakan nasional di atas ditetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045, dan menjadi arah kebijakan Sekretariat DPRD, yaitu pada arah kebijakan periode 2025-2029 : **Penguatan Fondasi Transformasi**, sebagai berikut :

1. Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi;
2. Penyempurnaan fondasi penataan regulasi;
3. Penerapan Manajemen resiko pada perencanaan dan pengendalian Pembangunan;
4. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; serta
5. Penguatan kapasitas masyarakat sipil.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam penentuan tujuan Renja SKPD harus mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun karena adanya sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) maka belum ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029, sehingga belum adanya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 dimaksud. Olehnya itu untuk sementara dapat menggunakan visi dan misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045. Adapun visi RPJPD tahun 2025-2045 tersebut, yaitu **“Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Kabupaten Maritim Hub Perbatasan yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”**.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJPD tersebut. Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang mendukung misi RPJPD ke-3 (tiga), yaitu **Transformasi Tata Kelola (Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, Efisien dan Adaptif)**. Adapun misi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *good governance*, dan pemakaian empat kata kunci tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud ke depannya dapat menonjol dalam hal akuntabel, efektif, efisien dan adaptif. Dari rumusan di atas maka Sekretariat DPRD pada Renstra dan Renja perangkat daerah menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Berdasarkan penetapan tujuan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Terfasilitasinya Kinerja DPRD.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD mengupayakan pencapaian tujuan secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun pelaksanaan Renstra dan Renja. Adapun Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;
- 2) Persentase Agenda Kerja DPRD yang diselesaikan tepat waktu.

3.3. Program dan kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 merupakan implementasi dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2045. Setiap program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan terakhir telah dirubah dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, kemudian Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Olehnya itu program Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2026, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 10 kegiatan yang meliputi 41 sub kegiatan. Adapun program ini digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, dan
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 7 kegiatan yang meliputi 36 sub kegiatan. Adapun program ini digunakan dalam meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui pelayanan Sekreteriat DPRD dan fasilitasi agenda kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Talaud yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2026. Sejalan dengan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 maka Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD dapat disajikan sebagai berikut :

4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI

	KINERJA PERANGKAT DAERAH
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.02.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4.0 2.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG

	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
4.02.02.2.01.01	Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Daerah

4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/Atau Naskah Akademik
4.02.02.2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
4.02.02.2.02	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4.02.02.2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.2.06	PELAKSANAAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
4.0 2.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4.0 2.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.0 2.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Program, kegiatan dan sub kegiatan dimungkinkan akan mengalami perubahan apabila dirasa dapat mengakomodir fasilitasi kegiatan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana, Program, Kegiatan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2			4	5	6	7	8	9	10
4.02	SEKRETARIAT DPRD					29.221.803.549				36.100.000.000
	SEKRETARIAT DPRD				Persentase Agenda Pembahasan Dewan Yang Terlaksana Tepat Waktu	100%	22.783.803.549		100%	27.482.000.000
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				% Rapat Dewan Yang Difasilitasi Tepat Waktu	85%	17.355.803.549	DAU	90%	17.651.000.000
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44 Dokumen	32.000.000	DAU	44 Dokumen	37.196.451
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melonguane	19 Dokumen	10.000.000		19 Dokumen	15.196.451
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melonguane & Manado	13 Laporan	10.000.000		13 Laporan	10.000.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melonguane	12 Laporan	12.000.000		12 Laporan	12.000.000
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		630 Dokumen	2.753.803.549	DAU	630 Dokumen	2.853.803.549
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Melonguane	36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	2.710.000.000		36 Orang/12 Bulan Gaji & TBK, Gaji ke-13 & THR	2.810.000.000
		02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melonguane	600 Dokumen SPP & SPM	20.000.000		600 Dokumen SPP & SPM	20.000.000
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melonguane	3 Laporan	8.803.549		3 Laporan	8.803.549

		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Melonguane	18 Laporan Keuangan	15.000.000			18 Laporan Keuangan	15.000.000
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Layanan Keuangan & Kesejahteraan DPRD		165 Dokumen	14.020.000.000	DAU		165 Dokumen	14.020.000.000
		01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Melonguane	25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	13.150.000.000			25 Orang/12 Bulan, Gaji 13 & THR, 3 Kali Tunjangan Reses	13.150.000.000
		02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Melonguane	150 Paket	650.000.000			150 Paket	650.000.000
		03	Pelaksanaan Medical check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Manado	25 Orang	220.000.000			25 Orang	220.000.000
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD		24 Dokumen	550.000.000	DAU		24 Dokumen	740.000.000
		01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Melonguane	25 Dokumen	10.000.000			25 Dokumen	10.000.000
		02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Melonguane	6 Laporan	-			6 Laporan	30.000.000
		03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Manado	12 Laporan	500.000.000			12 Laporan	600.000.000
		04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Melonguane	12 Paket	40.000.000			12 Paket	100.000.000
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						4.165.000.000	PAD			6.070.000.000
	4.02.02.08	Fasilitas Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD		120 Dokumen	4.165.000.000	PAD		120 Dokumen	6.070.000.000
		01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	50 Dokumen	2.500.000.000			80 Dokumen	4.000.000.000
		02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Melonguane	1 Laporan	5.000.000			1 Laporan	10.000.000

		03	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Melonguane	4 Dokumen	50.000.000			4 Dokumen	30.000.000
		04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	60 Dokumen	1.590.000.000			100 Dokumen	2.000.000.000
		05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Melonguane	6 Dokumen	20.000.000			6 Dokumen	30.000.000
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			% Sarpras Setwan Dalam Kondisi Baik		90%	1.058.000.000	DAU		90%	3.625.000.000
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		24 Dokumen	65.000.000	DAU		24 Dokumen	55.000.000
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	10 Dokumen	55.000.000			10 Dokumen	50.000.000
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melonguane	24 Laporan	10.000.000			24 Laporan	5.000.000
	4.02.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		83 Dokumen	502.000.000	DAU		83 Dokumen	750.000.000
		01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Melonguane	5 Paket	12.000.000			10 Paket	30.000.000
		02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Melonguane	3 Paket	30.000.000			50 Paket	150.000.000
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Melonguane	3 Paket	-			10 Paket	50.000.000
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Melonguane	5 Paket	80.000.000			5 Paket	80.000.000
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Melonguane	-	-			20 Paket	20.000.000
		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Melonguane	2 Paket	10.000.000			2 Paket	50.000.000
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Melonguane	15 Laporan	120.000.000			15 Laporan	120.000.000

		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	50 Laporan	250.000.000			50 Laporan	250.000.000
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 Dokumen	50.000.000	DAU		7 Dokumen	550.000.000
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	4 Unit	-			4 Unit	-
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	1 Unit	-			1 Unit	200.000.000
		05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	40 Unit	-			40 Unit	120.000.000
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	4 Unit	-			4 Unit	150.000.000
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	10 Unit	50.000.000			10 Unit	80.000.000
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		530 Laporan	391.000.000	DAU		530 Laporan	590.000.000
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melonguane	500 Laporan	5.000.000			500 Laporan	10.000.000
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Melonguane	12 Laporan	80.000.000			12 Laporan	100.000.000
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melonguane	6 Laporan	6.000.000			6 Laporan	30.000.000
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melonguane	12 Laporan	300.000.000			12 Laporan	450.000.000
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17 Unit	50.000.000	DAU		28 Unit	1.680.000.000
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Melonguane	1 Unit	20.000.000			1 Unit	80.000.000

		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Melonguane	1 Unit	-			10 Unit	50.000.000
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melonguane	-	-			2 Unit	1.500.000.000
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Melonguane	15 Unit	30.000.000			15 Unit	50.000.000
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			% SDM Aparatur Setwan Yang Bersertifikat Keahlian		90%	205.000.000	DAU		95%	136.000.000
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		94 Dokumen	205.000.000	DAU		94 Dokumen	136.000.000
		01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Melonguane	-	-			1 Unit	6.000.000
		02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Melonguane	76 Paket	120.000.000			76 Paket	40.000.000
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Melonguane	12 Dokumen	5.000.000			12 Dokumen	10.000.000
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	6 Orang	80.000.000			10 Orang	80.000.000
	SEKRETARIAT DPRD			Indeks Kepuasan Anggota DPRD		85	6.438.000.000	PAD & DAU		90	8.618.000.000
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			% Produk Hukum Yang Berasal dari Inisiatif DPRD		100%	4.383.000.000	PAD & DAU		10000%	6.298.000.000
				% Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Hingga Menjadi Produk Hukum Daerah		100%	3.210.000.000	PAD & DAU		100%	4.640.000.000
	4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		75 Dokumen	2.310.000.000	DAU		75 Dokumen	2.460.000.000
		01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Kepl. Talaud	12 Laporan	150.000.000			12 Laporan	300.000.000
		02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Melonguane	25 Dokumen	5.000.000			25 Dokumen	5.000.000

		03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Kepl. Talaud	75 Dokumen	2.155.000.000			75 Dokumen	2.155.000.000
		04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	3500 Orang	-			3500 Orang	-
	4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		24 Dokumen	750.000.000	PAD		24 Dokumen	1.980.000.000
		01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepl. Talaud	6 Dokumen	120.000.000			6 Dokumen	120.000.000
		02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Melonguane	6 Dokumen	60.000.000			6 Dokumen	60.000.000
		03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	6 Dokumen	450.000.000			6 Dokumen	450.000.000
		04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	6 Dokumen	120.000.000			6 Dokumen	150.000.000
		06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Kab. Kepl. Talaud	3500 Orang	-			3500 Orang	1.200.000.000
	4.02.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		2 Dokumen	150.000.000	PAD		2 Dokumen	200.000.000
		01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	2 Dokumen	150.000.000			2 Dokumen	200.000.000
				% Anggota DPRD Yang Bersertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas		100%	1.173.000.000	DAU		100%	1.658.000.000
	4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD		20 Dokumen	1.173.000.000	DAU		20 Dokumen	1.658.000.000
		01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	-	-			-	-
		02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	Sulawesi Utara & P. Jawa & Sekitarnya	2 Dokumen	350.000.000			2 Dokumen	500.000.000

		04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Melonguane	3 orang/12 Bulan	180.000.000			3 orang/12 Bulan	180.000.000
		05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Melonguane	6 Orang/12 Bulan	168.000.000			6 Orang/12 Bulan	168.000.000
		06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepl. Talaud	5 Dokumen	120.000.000			5 Dokumen	150.000.000
		07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Melonguane	2 Dokumen	5.000.000			2 Dokumen	10.000.000
		08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	4 Dokumen	350.000.000			4 Dokumen	650.000.000
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			% Perda Yang Diterbitkan Tepat Waktu		100%	2.055.000.000	DAU		100%	2.320.000.000
				% Temuan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Ditindaklanjuti DPRD tepat waktu		100%	2.055.000.000	DAU		100%	2.320.000.000
	4.02.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran		7 Dokumen	750.000.000	DAU		7 Dokumen	770.000.000
		01	Pembahasan KUA dan PPS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPS	Melonguane	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
		02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melonguane	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
		03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Melonguane	1 Dokumen	260.000.000			1 Dokumen	260.000.000
		04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Melonguane	1 Dokumen	260.000.000			1 Dokumen	260.000.000
		05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Melonguane	2 Dokumen	80.000.000			2 Dokumen	100.000.000
		06	Pembahasan Petanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Melonguane	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000
	4.02.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		43 Laporan	1.305.000.000	DAU		43 Laporan	1.550.000.000

		01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	12 Laporan	350.000.000			12 Laporan	450.000.000
		02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	12 Laporan	450.000.000			12 Laporan	450.000.000
		03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	12 Laporan	350.000.000			12 Laporan	350.000.000
		04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	-	-			-	-
		05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	-	-			-	-
		06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	6 Dokumen	70.000.000			6 Dokumen	100.000.000
		07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	0	-			12 Dokumen	100.000.000
		08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepl. Talaud, Sula wesi Utara	1 Dokumen	85.000.000			1 Dokumen	100.000.000

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang dikelola oleh seluruh Bagian sesuai rencana yang telah ditentukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai yang ada dan melibatkan bagian-bagian lainnya dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun anggaran 2026 berisi Program dan Kegiatan serta pagu Indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendukung prioritas Pembangunan Daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan Sasaran Program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adapun pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Ranwal Renja Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			PAGU/PENDANAAN
1	2			3
4.02	SEKRETARIAT DPRD			29.221.803.549
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.618.803.549
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.000.000
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.753.803.549
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.710.000.000
		02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.803.549
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	15.000.000
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		65.000.000
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	55.000.000

	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		205.000.000
	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-
	02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000
4.02.01.1.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		502.000.000
	01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000
	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	-
	07	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.000.000
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
	05	Pengadaan Meubel	-
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		391.000.000
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-

	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		14.020.000.000
	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.150.000.000
	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	650.000.000
	03	Pelaksanaan Medical check Up	220.000.000
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD		550.000.000
	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10.000.000
	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	-
	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	500.000.000
	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	40.000.000
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		10.603.000.000
4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		750.000.000
	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.000.000
	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	60.000.000
	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	450.000.000
	04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	120.000.000
	05	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-
4.02.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		750.000.000
	01	Pembahasan KUA dan PPS	50.000.000
	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000
	03	Pembahasan APBD	260.000.000
	04	Pembahasan APBD Perubahan	260.000.000
	05	Pembahasan Laporan Semester	80.000.000
	06	Pembahasan Petanggungjawaban APBD	50.000.000
4.02.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		1.305.000.000
	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	350.000.000
	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	450.000.000
	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	350.000.000
	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-
	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-
	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	70.000.000

	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-
	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	85.000.000
4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		1.173.000.000
	01	Orientasi DPRD	-
	02	Pendalaman Tugas DPRD	350.000.000
	03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180.000.000
	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	168.000.000
	05	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120.000.000
	06	Penyusunan Program Kerja DPRD	5.000.000
	07	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	350.000.000
4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2.310.000.000
	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	150.000.000
	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.000.000
	03	Pelaksanaan Reses	2.155.000.000
	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-
4.02.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		150.000.000
	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	150.000.000
4.02.02.08	Fasilitas Tugas DPRD		4.165.000.000
	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.500.000.000
	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.000.000
	03	Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	50.000.000
	04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1.590.000.000
	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20.000.000

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026.

Dalam penyempurnaan Ranwal Renja tersebut apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan akan dimuat pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu penyusunan Ranwal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak terlepas dari rencana efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah. Hal ini mengakibatkan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Optimaslisasi yang diperlukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelaksanaan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Ranwal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 merupakan suatu rancangan awal terhadap perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai sifat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Sekretariat DPRD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Sekretariat DPRD, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Melonguane, September 2025

SEKRETARIS DPRD,



ARVAN H. BAWANGUN, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770915 200212 1 003

LAMPIRAN